Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4879-4890
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4879-4890
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Peran Koperasi Desa dalam Pembangunan Desa Terhadap Pengurangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan atau Pedesaan

Mustajaburahman Saut Silalahi[1], Nurul Islamidiyah[2], Dwi Dara Sonya Gracia Pakpahan[3], Janera Maharani[4], Laura Natalie Br. Tarigan[5], Bisru Hafi[6]
[1,2,3,4,5,6] Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email : musasilalahi29@gmail.com [1]; nurulislamidiyah@gmail.com [2]; pakpahangracia9@gmail.com [3]; janeramaharani@gmail.com [4]; lauranatalieee@gmail.com [5]; bisru.hafi@usu.ac.id [6]

Abstrak

Kemiskinan di perdesaan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap modal, sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, dan pasar. Koperasi desa menjadi salah satu lembaga ekonomi yang berpotensi membantu mengatasi permasalahan tersebut melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi desa dalam pembangunan desa dan pengurangan kemiskinan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan sumber akademik yang relevan, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa koperasi desa memiliki peran dalam memperluas akses permodalan, meningkatkan pendapatan, memperkuat posisi tawar masyarakat, membuka kesempatan kerja, serta mengembangkan kemandirian ekonomi. Selain itu, koperasi juga berfungsi sebagai organisasi sosial yang memperkuat gotong royong dan kerja sama masyarakat, sekaligus sebagai badan usaha yang perlu dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kemampuan manajerial, persaingan pasar, rendahnya partisipasi anggota, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang profesional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transparansi, serta kerja sama dengan berbagai pihak agar koperasi desa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kata Kunci: Koperasi Desa, Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

Rural poverty remains a significant development challenge, linked to limited access to capital, economic resources, employment opportunities, and markets. Village cooperatives serve as economic institutions with the potential to address these issues through community empowerment and the development of collective enterprises. This study aims to analyze the role of village cooperatives in rural development and poverty alleviation, while identifying the factors that both support and hinder their success. A qualitative research method—specifically a literature review—was employed. Data were gathered from various scientific journals, books, and relevant academic sources, then analyzed based on existing theories and findings from previous research. The study indicates that village cooperatives contribute to expanding access to capital, increasing incomes, strengthening the community's bargaining position, creating employment, and fostering economic self-reliance. Furthermore,

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

these cooperatives function as social organizations that reinforce the spirit of mutual cooperation (gotong-royong) among community members, while simultaneously operating as business entities that require productive and sustainable management. Nevertheless, in practice, village cooperatives face various challenges, such as limited managerial capacity, market competition, low member participation, and a lack of digital technology adoption. Therefore, professional management, the enhancement of human resource quality, transparency, and collaboration with various stakeholders are crucial for ensuring that village cooperatives can deliver tangible benefits to the community.
Keywords: *Village Cooperatives, Poverty, Economic Empowerment, Rural Development, Community Welfare.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan di perdesaan masih menjadi persoalan pembangunan yang belum tuntas, meskipun angka kemiskinan nasional terus menurun. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 22,93 juta orang atau 8,07 persen, turun 0,43 juta orang dibandingkan September 2025 (BPS, 2026). Namun, penurunan tersebut belum merata. Persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 10,67 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34 persen. Sebanyak 12,10 juta orang miskin masih bermukim di desa (BPS, 2026). Selama September 2025 hingga Maret 2026, kemiskinan desa hanya turun 0,05 poin persentase, sedangkan kemiskinan kota turun 0,26 poin (BPS, 2026). Data ini menunjukkan bahwa pembangunan desa belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan.

Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Heryani dan Mardiansjah (2017) menemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin perdesaan cenderung bersifat preventif sehingga belum dapat dijadikan alat utama dalam penanggulangan kemiskinan. Koperasi dipandang sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan tersebut. Wardana dkk. (2025) menyebutkan bahwa koperasi berpotensi menjadi solusi pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan melalui pengelolaan usaha yang berbasis partisipasi anggota. Azhari (2026) juga menunjukkan bahwa produktivitas koperasi berperan penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan, meskipun dalam praktiknya produktivitas tersebut belum berjalan secara optimal.

Pemerintah merespons peluang ini melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menginstruksikan pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 koperasi desa/kelurahan (Presiden Republik Indonesia, 2025). Namun, banyaknya koperasi yang terbentuk tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) memberikan pelajaran penting. Pemerintah pernah memberikan dukungan penuh kepada KUD melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984. Studi pada perkebunan kelapa sawit di Jambi menunjukkan bahwa KUD mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya. Namun, KUD belum memiliki perencanaan bisnis yang maju dan modern sehingga mengalami kesulitan dalam bersaing (Suratno dkk., 2021). Suarmanayasa dan Susila (2025) bahkan mencatat adanya penurunan kepercayaan masyarakat akibat sejarah kegagalan koperasi, yang kini menjadi tantangan dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Dengan demikian, koperasi desa memiliki peluang sekaligus risiko, bergantung pada bagaimana perannya dijalankan dalam pembangunan desa.

Kajian yang ada umumnya membahas koperasi secara umum atau pada sektor tertentu. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana koperasi desa berperan dalam pembangunan desa untuk mengurangi kemiskinan, khususnya pada masa implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, masih perlu diperkuat. Azhari (2026) juga mencatat bahwa kontribusi koperasi terhadap pengurangan kemiskinan sulit diukur secara objektif karena kurangnya evaluasi berbasis data yang komprehensif. Sebenarnya, terdapat berbagai alternatif pendekatan untuk mengurangi kemiskinan, mulai dari program

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga badan usaha milik desa. Koperasi dipilih sebagai fokus kajian karena berbasis keanggotaan, menempatkan warga desa sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan, serta saat ini mendapat dukungan kebijakan yang kuat. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji adalah bagaimana peran koperasi desa dalam pembangunan desa menuju pengurangan kemiskinan, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran koperasi desa dalam pembangunan desa untuk mengurangi kemiskinan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan implikasi bagi penguatan kelembagaan koperasi desa. Secara teoretis, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai ekonomi kerakyatan dan pembangunan perdesaan. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, pengelola koperasi, dan pembuat kebijakan dalam merancang pengelolaan koperasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin. Dalam artikel ini, koperasi desa dimaknai sebagai badan usaha berbasis keanggotaan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat desa untuk menyediakan layanan ekonomi dan sosial. Sementara itu, pengurangan kemiskinan dipahami sebagai penurunan jumlah dan persentase penduduk desa yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan.

LANDASAN TEORI

1. Kemiskinan Nelayan dan Masyarakat Pedesaan

Kemiskinan nelayan pada dasarnya terjadi akibat ketidakberdayaan dalam menginstalasi atau mengakses sumber daya alam yang tersedia. Kondisi ini diperparah oleh beberapa faktor utama, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, ketiadaan modal usaha, rendahnya aksesibilitas terhadap sumber daya dan pasar. Faktor-faktor tersebut menjadikan nelayan sebagai kelompok yang termarjinalkan. Satria dan Arif menegaskan bahwa nelayan umumnya memiliki status sosial yang relatif rendah.

a. Perspectives / Aliran Kemiskinan Nelayan

Modernisasi (Kultural/Alamiah): Kemiskinan nelayan dipicu oleh faktor budaya (seperti kemalasan), keterbatasan modal, kelemahan manajemen, serta kondisi alamiah.

Struktural: Faktor eksternal menjadi penyebab utama, seperti hubungan ketimpangan mikro-desa atau adanya transfer surplus dari nelayan kepada pihak patron.

Makrostruktural: Kurangnya dukungan politik pembangunan di sektor kelautan dan perikanan sehingga sektor ini tidak berkembang secepat sektor lainnya.

b. Budaya Miskin VS Faktor Lembaga

Pendapat Umum (Budaya Miskin): Merujuk pada karakteristik mental dan perilaku individu/masyarakat pedesaan (sekitar 14,17% populasi) yang terlabeli malas bekerja keras, tidak memiliki visi masa depan, mengabaikan pendidikan, percaya hal mistis, nyaman dengan kondisi yang ada, serta minim semangat berprestasi.

Pendapat Muhammad Yunus: Kemiskinan bukan disebabkan oleh sifat malas atau bodoh, melainkan karena lembaga keuangan tidak menyediakan akses bagi masyarakat miskin untuk memperluas basis ekonomi mereka.

c. Eksklusi Sosial dan Bentuk Kemiskinan

Kemiskinan di pedesaan berhubungan erat dengan eksklusi sosial, yaitu proses yang membatasi akses seseorang atau kelompok terhadap sumber daya untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Terdapat 5 Kekuatan Pendorong Eksklusi Sosial (Pierson): Kemiskinan dan penghasilan rendah, ketiadaan akses ke pasar kerja, lemahnya atau tidak adanya dukungan serta jaringan social, efek negatif dari lingkungan sekitar, terputusnya akses dari layanan dasar

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

2. Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian dan Tujuan Koperasi

Menurut Bung Hatta, koperasi didirikan sebagai perserikatan kelompok rentan untuk melindungi kebutuhan hidupnya dengan biaya sekecil mungkin melalui prinsip tolong-menolong dan kekeluargaan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Sementara itu, Chaniago (1973) mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan orang atau badan hukum yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi bersama.

b. Fungsi Koperasi Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, koperasi memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasian ekonomi nasional, salah satu urat nadi perekonomian Indonesia, serta alat pembina masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa dan mengatur perekonomian rakyat secara bersama-sama. Ada 2 bentuk-bentuk kemiskinan yaitu kemiskinan absolut: ketiadaan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan dan tempat tinggal dan kemiskinan relatif: keterbatasan sumber daya (materi, budaya, sosial) yang menyebabkan ketidakmampuan mengikuti standar bersosialisasi pada umumnya.

c. Koperasi Desa Merah Putih

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan badan usaha di tingkat desa yang didukung oleh pendanaan pemerintah dengan bunga rendah sebesar 2–6% untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi ini juga berperan dalam memperkuat posisi tawar masyarakat di pasar (Munkner, 2012). Menurut Syafrizal et al. (2025), Koperasi Desa Merah Putih memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai organisasi sosial (*Gemeinschaft*) yang berperan memperkuat kohesi dan ikatan sosial masyarakat. Kedua, sebagai badan usaha bisnis (*Gesellschaft*) yang berorientasi pada keuntungan demi menjaga keberlanjutan organisasi.

3. Modal Sosial (Pierre Bourdieu)

Menurut Pierre Bourdieu, modal sosial bukan sekadar kepemilikan jaringan sosial yang luas, melainkan akumulasi sumber daya aktual maupun potensial yang berkaitan dengan kepemilikan jaringan hubungan yang terinstitusionalisasi. Berdasarkan pemikiran Bourdieu (1986) serta Bourdieu dan Wacquant (1992), modal sosial memiliki beberapa karakteristik. Modal sosial berada pada tingkat individu dan berkaitan dengan posisi atau status sosial. Selain itu, modal sosial dapat digunakan untuk mengerahkan kekuasaan terhadap individu atau kelompok lain guna menggerakkan sumber daya. Modal sosial juga tidak dapat dipisahkan dari struktur kelas dan stratifikasi sosial karena berasal dari struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan serta status.

4. Stratifikasi Sosial

a. Dimensi Stratifikasi Menurut Max Weber

Menurut Max Weber, stratifikasi sosial memiliki tiga dimensi utama. Pertama, kelas ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan serta kepemilikan barang dan jasa. Kedua, status sosial yang dilihat dari prestise dan kehormatan seseorang. Ketiga, kekuasaan politik atau partai yang diukur berdasarkan besarnya kekuasaan yang dapat dijalankan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

b. Kriteria Stratifikasi Menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, stratifikasi sosial dapat dilihat berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kekayaan atau kepemilikan harta benda, kekuasaan dan wewenang untuk mengatur pihak lain, kehormatan atau tingkat penghargaan seseorang di mata masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki.

c. Stratifikasi Sosial Masyarakat Nelayan Menurut Robert M.Z. Lawang

Robert M.Z. Lawang membedakan lapisan sosial masyarakat nelayan berdasarkan kepemilikan alat produksi, seperti modal dan kapal, serta pembagian kerja. Lapisan atas ditempati oleh punggawa, pemilik modal, atau juragan yang memiliki kapal besar, mesin modern, dan alat tangkap lengkap. Mereka bertindak sebagai pemodal, memegang kendali dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Lapisan menengah terdiri atas nelayan mandiri atau tradisional yang memiliki alat tangkap sendiri, seperti perahu dayung atau perahu bermotor kecil. Mereka bekerja secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa sepenuhnya bergantung pada juragan. Sementara itu, lapisan bawah ditempati oleh sawi atau nelayan buruh yang tidak memiliki modal maupun alat tangkap sendiri. Mereka hanya mengandalkan tenaga untuk bekerja di kapal milik punggawa. Posisi ini membuat mereka lebih rentan secara ekonomi karena penghasilan bergantung pada sistem bagi hasil.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam melalui berbagai sumber literatur yang relevan. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengolahan data berupa angka, melainkan pada pemahaman terhadap konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber akademis lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena yang dikaji dengan membandingkan berbagai pandangan dan temuan dari penelitian sebelumnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber tertulis yang telah tersedia. Data sekunder tersebut berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, publikasi akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi isi, kredibilitas sumber, serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Sumber-sumber yang digunakan diutamakan berasal dari publikasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga informasi yang diperoleh dapat mendukung proses analisis dan pembahasan penelitian. Penggunaan berbagai sumber literatur ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang beragam, sehingga peneliti dapat melihat fenomena yang dikaji dari berbagai sudut pandang.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dibahas serta menghasilkan analisis yang didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka. Data diperoleh dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, terutama jurnal-jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku, serta sumber akademik lainnya. Literatur yang digunakan berkaitan dengan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

koperasi desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemiskinan masyarakat nelayan dan pedesaan, serta peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dibaca, dipahami, dan dianalisis untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus pembahasan. Selanjutnya, berbagai hasil penelitian terdahulu dibandingkan dan disusun secara sistematis untuk mendukung analisis serta memperkuat landasan teori dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Koperasi Desa dalam Penguatan Perekonomian Masyarakat Pedesaan

Berdasarkan hasil kajian literatur, koperasi desa memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat pedesaan, terutama dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, permodalan, dan pemasaran hasil produksi. Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, baik dalam sektor pertanian, perikanan, peternakan, maupun usaha mikro dan kecil. Namun, potensi tersebut belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya kemampuan pengelolaan usaha, serta terbatasnya akses terhadap pasar yang lebih luas. Dalam kondisi tersebut, koperasi desa dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang menghimpun kepentingan masyarakat melalui kegiatan usaha bersama. Keberadaan koperasi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh berbagai kebutuhan ekonomi melalui mekanisme kerja sama antaranggota. Koperasi tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga dapat mengembangkan unit usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi penghubung antara kegiatan produksi masyarakat dengan aktivitas distribusi dan pemasaran.

Munkner (2012) menjelaskan bahwa koperasi berperan dalam memperlancar pemenuhan kebutuhan ekonomi anggotanya sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar lembaga penyedia modal. Koperasi juga berperan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui penggabungan sumber daya, kepentingan, dan kegiatan usaha secara kolektif. Masyarakat yang sebelumnya menjalankan kegiatan ekonomi secara individu dapat memperoleh keuntungan dari kerja sama dalam koperasi, terutama dalam hal pengadaan bahan baku, pengelolaan hasil produksi, dan pemasaran produk.

Temuan Putri dan Riofita (2026) turut menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi dalam memperkuat usaha produktif, memperluas akses permodalan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat pedesaan.

Peran Koperasi Desa dalam Memperluas Akses Permodalan dan Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Permodalan merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Keterbatasan modal sering kali menyebabkan masyarakat kesulitan mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, maupun memenuhi kebutuhan operasional. Kondisi tersebut dapat dialami oleh petani yang membutuhkan biaya untuk membeli benih dan pupuk, nelayan yang memerlukan perlengkapan melaut, serta pelaku usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk membeli bahan baku dan mengembangkan produk. Koperasi desa dapat berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui penyediaan layanan pembiayaan dan simpan pinjam bagi anggota. Melalui mekanisme koperasi, masyarakat memiliki alternatif sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan usaha. Dukungan pendanaan pemerintah dengan tingkat bunga yang relatif rendah, sebagaimana dijelaskan dalam kajian Koperasi Desa Merah Putih, juga dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kemampuan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

pembiayaan koperasi. Dengan adanya dukungan tersebut, koperasi diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber modal yang lebih terjangkau.

Apabila dikaitkan dengan pemikiran Munkner (2012), akses permodalan merupakan bagian dari upaya koperasi dalam memperlancar kebutuhan ekonomi anggotanya. Modal yang diperoleh melalui koperasi dapat digunakan untuk kegiatan produktif sehingga masyarakat memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas dan pendapatan usahanya. Misalnya, petani dapat menggunakan tambahan modal untuk meningkatkan kualitas produksi, sedangkan nelayan dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan operasional melaut dan memperbaiki sarana produksi. Selain menyediakan modal, koperasi juga perlu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendampingan usaha. Pendampingan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemberian informasi mengenai pengelolaan keuangan, perencanaan produksi, pengembangan produk, hingga strategi pemasaran. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan berupa dana, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha secara mandiri.

Kemandirian ekonomi menjadi aspek penting dalam pembangunan pedesaan karena masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya melalui kegiatan produktif yang berkelanjutan. Dalam hal ini, koperasi berperan sebagai lembaga yang membantu masyarakat mengembangkan kemampuan ekonomi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan informal yang dapat memberatkan. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi dalam memperluas akses permodalan perlu diukur tidak hanya dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari manfaat pembiayaan terhadap perkembangan usaha anggota. Pembiayaan yang dikelola secara tepat dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.

Peran Koperasi Desa dalam Meningkatkan Posisi Tawar dan Memperluas Akses Pasar Masyarakat

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi masyarakat pedesaan adalah lemahnya posisi tawar dalam kegiatan perdagangan. Petani dan nelayan sebagai produsen umumnya memiliki keterbatasan dalam menentukan harga jual karena hasil produksinya harus segera dipasarkan, sementara akses terhadap konsumen dan jaringan distribusi masih terbatas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan produsen bergantung pada tengkulak atau perantara yang memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan harga pembelian. Dalam situasi tersebut, koperasi desa dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang memperkuat posisi tawar masyarakat melalui pengumpulan dan pemasaran hasil produksi secara kolektif. Ketika masyarakat memasarkan hasil produksi secara individu, jumlah produk yang ditawarkan mungkin relatif kecil sehingga kemampuan untuk melakukan negosiasi harga menjadi terbatas. Sebaliknya, melalui koperasi, hasil produksi dari beberapa anggota dapat dihimpun menjadi jumlah yang lebih besar sehingga memiliki peluang untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas. Peran tersebut sejalan dengan pemikiran Munkner (2012) mengenai fungsi koperasi dalam memperkuat posisi tawar anggotanya di pasar. Koperasi memungkinkan anggota memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar melalui kerja sama dan penggabungan sumber daya. Dengan demikian, anggota tidak sepenuhnya bergantung pada pihak perantara dalam memasarkan hasil produksinya.

Pada masyarakat nelayan, misalnya, koperasi dapat membantu menghimpun hasil tangkapan dari beberapa nelayan untuk dipasarkan kepada pedagang besar, pasar tradisional, restoran, maupun pelaku industri pengolahan ikan. Koperasi juga berpotensi menyediakan fasilitas penyimpanan dingin untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sebelum dipasarkan. Fasilitas tersebut penting karena produk perikanan memiliki karakteristik mudah mengalami penurunan kualitas apabila tidak ditangani dengan baik. Sementara itu, pada masyarakat pertanian, koperasi dapat berperan dalam mengumpulkan hasil panen, menyediakan fasilitas penyimpanan, serta menghubungkan petani dengan pembeli dalam skala yang lebih besar. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

mengurangi ketergantungan terhadap penjualan hasil produksi secara individual dan memperoleh alternatif saluran pemasaran.

Syafrizal et al. (2025) menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki peluang dalam memperkuat ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal dan pengembangan kegiatan usaha produktif. Keberadaan koperasi dapat menjadi sarana untuk menghubungkan produsen lokal dengan pasar yang lebih luas. Selain itu, koperasi dapat berperan sebagai pengumpul produk masyarakat sehingga proses distribusi menjadi lebih terorganisasi.

Dengan demikian, peran koperasi dalam memperluas akses pasar tidak hanya berkaitan dengan kegiatan jual beli, tetapi juga mencakup penguatan kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil produksi dan menentukan strategi pemasaran. Apabila fungsi tersebut berjalan secara optimal, koperasi dapat membantu masyarakat memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil usaha mereka.

Koperasi Desa sebagai Organisasi Sosial (*Gemeinschaft*) dan Badan Usaha (*Gesellschaft*)

Koperasi desa memiliki karakteristik yang berbeda dari badan usaha pada umumnya karena tidak hanya berfokus pada kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Syafrizal et al. (2025) menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai organisasi sosial (*Gemeinschaft*) yang memperkuat hubungan masyarakat dan sebagai badan usaha (*Gesellschaft*) yang berorientasi pada keuntungan demi menjaga keberlanjutan organisasi.

1. Koperasi sebagai Organisasi Sosial (Gemeinschaft)

Sebagai organisasi sosial, koperasi desa dibangun berdasarkan prinsip kekeluargaan, gotong royong, kepercayaan, dan kerja sama. Dalam masyarakat pedesaan, nilai kebersamaan tersebut menjadi modal sosial yang dapat mendukung perkembangan koperasi. Melalui koperasi, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Petani, misalnya, dapat bekerja sama dalam penyediaan pupuk dan pemasaran hasil panen, sedangkan nelayan dapat saling membantu dalam pengadaan perlengkapan melaut dan pemasaran hasil tangkapan. Kegiatan ini tidak hanya membantu perekonomian, tetapi juga memperkuat hubungan antaranggota.

Menurut Syafrizal et al. (2025), koperasi sebagai organisasi sosial berperan dalam memperkuat kohesi masyarakat. Namun, hal tersebut membutuhkan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengembangan usaha. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi wadah ekonomi yang tetap mempertahankan nilai kebersamaan dan kepentingan bersama.

2. Koperasi sebagai Badan Usaha (Gesellschaft)

Selain memiliki fungsi sosial, koperasi juga harus mampu menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Syafrizal et al. (2025) menjelaskan bahwa orientasi keuntungan diperlukan agar kegiatan operasional koperasi dapat terus berjalan dan berkembang. Keuntungan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pengelola, melainkan juga digunakan untuk memperkuat modal, meningkatkan pelayanan, dan mengembangkan usaha koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu memiliki perencanaan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Contohnya, koperasi di wilayah pertanian dapat menyediakan pupuk, benih, dan membantu pemasaran hasil panen.

Sementara itu, koperasi di wilayah pesisir dapat menyediakan perlengkapan melaut serta membantu pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. Agar usaha berjalan dengan baik, koperasi perlu menerapkan pengelolaan yang profesional, termasuk pencatatan keuangan dan perhitungan biaya serta pendapatan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya mampu memperkuat hubungan sosial masyarakat, tetapi juga menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif dan berkelanjutan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Keseimbangan Fungsi Sosial dan Fungsi Bisnis dalam Koperasi Desa

Fungsi sosial dan fungsi bisnis merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam keberlangsungan koperasi desa. Fungsi sosial menjadi dasar pembentukan kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi masyarakat, sedangkan fungsi bisnis memastikan bahwa kegiatan ekonomi koperasi dapat berjalan secara efektif dan menghasilkan manfaat bagi anggotanya. Apabila koperasi hanya mengutamakan fungsi sosial tanpa memperhatikan kelayakan usaha, kegiatan ekonomi berpotensi mengalami kesulitan dalam mempertahankan operasional. Sebaliknya, apabila koperasi hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan anggota, koperasi dapat kehilangan karakteristiknya sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Oleh karena itu, kedua fungsi tersebut harus dijalankan secara seimbang. Pengurus perlu memastikan bahwa kegiatan usaha menghasilkan keuntungan yang memadai, tetapi tetap memperhatikan keterjangkauan pelayanan dan manfaat ekonomi bagi anggota. Di sisi lain, anggota juga perlu berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan usaha koperasi agar organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Keseimbangan tersebut menjadi penting dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih karena koperasi tidak hanya diharapkan menjadi instrumen peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dapat dilihat dari kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi sekaligus mempertahankan hubungan sosial dan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat desa.

Kontribusi Koperasi Desa terhadap Pengurangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan dan Pedesaan

Kemiskinan masyarakat pedesaan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap modal, sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, dan pasar. Pada masyarakat nelayan, kemiskinan dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian hasil tangkapan, kondisi cuaca, serta ketergantungan terhadap perantara. Sementara itu, masyarakat pertanian menghadapi kendala seperti tingginya biaya produksi dan terbatasnya akses pemasaran. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, koperasi desa dapat menjadi salah satu sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dapat dilihat melalui beberapa hal.

Pertama, koperasi membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penyediaan modal, sarana produksi, dan pemasaran yang lebih terorganisasi. Kedua, koperasi dapat mengurangi beban pengeluaran dengan menyediakan barang dan kebutuhan pokok yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Ketiga, pengembangan unit usaha koperasi, seperti toko, distribusi barang, dan pemasaran hasil pertanian maupun perikanan, dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Keempat, koperasi dapat memperkuat posisi tawar petani dan nelayan dalam memasarkan hasil produksi sehingga ketergantungan terhadap pihak perantara dapat dikurangi. Kelima, keterlibatan dalam kegiatan koperasi dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha, mencatat keuangan, bekerja sama, dan mengambil keputusan ekonomi secara mandiri.

Jika dikaitkan dengan pemikiran Munkner (2012), koperasi berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dan memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Sementara itu, Syafrizal et al. (2025) menekankan pentingnya fungsi sosial koperasi melalui gotong royong dan kerja sama dalam mendukung kegiatan ekonomi bersama. Meskipun demikian, keberhasilan koperasi dalam mengurangi kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organisasi atau jumlah unit usahanya, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan demikian, koperasi desa berpotensi mendukung pengurangan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, kemudahan akses ekonomi, dan penguatan kemandirian masyarakat.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Tantangan dan Strategi Pengembangan Koperasi Desa dalam Mendukung Pembangunan Pedesaan

Meskipun memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, koperasi desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, pengelolaan organisasi, partisipasi anggota, dan persaingan pasar.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kemampuan manajerial pengurus dalam merencanakan usaha, mengelola keuangan, dan melakukan evaluasi kegiatan. Syafrizal et al. (2025) menyebutkan bahwa kapasitas manajerial menjadi salah satu persoalan dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Oleh karena itu, dukungan pendanaan pemerintah perlu disertai dengan peningkatan kemampuan pengelola agar modal dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, koperasi juga menghadapi persaingan dengan toko modern dan pelaku usaha lain yang memiliki modal serta jaringan pemasaran lebih kuat. Partisipasi anggota turut menjadi faktor penting karena keberhasilan koperasi membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan, mengambil keputusan, dan mengawasi kegiatan organisasi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pencatatan keuangan, pengelolaan persediaan, dan pemasaran produk.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen koperasi, keuangan, dan pemasaran. Kedua, mengembangkan unit usaha sesuai dengan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian dan perikanan. Ketiga, memperkuat transparansi dan akuntabilitas agar anggota dapat mengetahui kondisi keuangan serta perkembangan usaha koperasi. Keempat, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan memperluas pemasaran. Kelima, membangun kerja sama dengan pemerintah desa, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk memperluas akses pasar serta mendukung pengembangan koperasi. Strategi tersebut sejalan dengan penelitian Syafrizal et al. (2025), yang menekankan pentingnya pelatihan sumber daya manusia, digitalisasi, dan kemitraan strategis dalam memperkuat ekonomi pedesaan.

Dengan demikian, keberhasilan koperasi desa tidak hanya bergantung pada pembentukan organisasi dan dukungan modal, tetapi juga pada pengelolaan yang profesional, partisipasi aktif masyarakat, serta pengembangan usaha sesuai dengan potensi ekonomi lokal.

Analisis Keterkaitan Koperasi Desa dengan Pembangunan Desa dan Pengurangan Kemiskinan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, koperasi desa memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan desa karena keberadaannya dapat memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal. Pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan, pengembangan kegiatan produktif, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, koperasi dapat menjadi salah satu sarana untuk menghubungkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan upaya pembangunan desa.

Jika dianalisis berdasarkan teori Munkner (2012), koperasi memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa melalui kemampuannya memperlancar kebutuhan ekonomi anggota dan memperkuat posisi tawar masyarakat di pasar. Fungsi tersebut penting karena keterbatasan akses ekonomi merupakan salah satu hambatan yang dapat menghambat perkembangan usaha masyarakat pedesaan. Sementara itu, berdasarkan pemikiran Syafrizal et al. (2025), koperasi desa juga memiliki dimensi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonominya. Sebagai organisasi sosial (Gemeinschaft), koperasi memperkuat hubungan dan kerja sama masyarakat melalui prinsip gotong royong. Sebagai

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

badan usaha (Gesellschaft), koperasi dituntut untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif dan menghasilkan keuntungan agar mampu mempertahankan keberlanjutannya.

Dalam kaitannya dengan pengurangan kemiskinan, koperasi memiliki potensi untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha produktif, memperluas kesempatan kerja, dan memperoleh akses pasar yang lebih baik. Namun, kontribusi tersebut membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan serta partisipasi aktif masyarakat agar manfaat koperasi dapat dirasakan secara lebih luas.

Oleh karena itu, Koperasi Desa Merah Putih dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendukung pembangunan desa. Keberadaannya diharapkan tidak hanya menjadi program pembentukan badan usaha di tingkat desa, tetapi juga mampu membangun sistem ekonomi masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa koperasi desa memiliki peran dalam mendukung pengurangan kemiskinan melalui penguatan ekonomi dan sosial masyarakat. Peran ekonomi diwujudkan melalui akses permodalan, pengembangan usaha, peningkatan posisi tawar, dan perluasan pemasaran. Sementara itu, peran sosial diwujudkan melalui gotong royong, kerja sama, partisipasi, dan penguatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, koperasi desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa dan mengurangi kemiskinan masyarakat. Koperasi dapat membantu masyarakat mengatasi keterbatasan akses permodalan, mengembangkan usaha produktif, memperluas pemasaran, meningkatkan posisi tawar, serta membuka kesempatan kerja. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi, khususnya bagi kelompok petani dan nelayan yang sering menghadapi keterbatasan sumber daya.

Koperasi desa juga memiliki dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu sebagai organisasi sosial (*Gemeinschaft*) dan badan usaha (*Gesellschaft*). Sebagai organisasi sosial, koperasi memperkuat hubungan antaranggota melalui gotong royong, kepercayaan, dan kerja sama. Sementara itu, sebagai badan usaha, koperasi harus mampu menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif agar dapat mempertahankan keberlangsungannya. Kedua fungsi tersebut perlu berjalan seimbang agar koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tetap memperhatikan kesejahteraan anggotanya.

Meskipun demikian, pengembangan koperasi desa masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya kemampuan manajerial pengurus, keterbatasan akses pasar, kurangnya partisipasi anggota, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan yang transparan, pengembangan usaha sesuai potensi lokal, serta kerja sama dengan pemerintah dan pihak lainnya.

Dengan demikian, keberhasilan koperasi desa tidak cukup hanya dilihat dari pembentukan organisasi atau besarnya dukungan modal, tetapi juga dari kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi yang benar-benar melibatkan masyarakat dan mampu mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis peluang dan tantangan Koperasi Desa Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi desa. Accounting Progress, 4(2), 80–85.

Azhari. (2026). Koperasi sebagai katalisator pengentasan kemiskinan: Pendekatan metode ganda. *Jurnal Simki Economic, 9*(2), 338–350.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). *Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen*.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241–258). Greenwood Press.

Bourdieu, P., & Wacquant, L. P. D. (1992). An Invitation to Reflexive Sociology. University of Chicago Press.

Chaniago, A. (1973). Perkoperasian Indonesia. Angkasa.

Heryani, D., & Mardiansjah, F. H. (2017). Pemberdayaan ekonomi produktif dalam penanggulangan kemiskinan perdesaan di Kabupaten Rembang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 13*(1), 14–26.

Munkner, H. (2012). Cooperatives and Rural Development: A Perspective. ICA Publications.

Presiden Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.

Putri, D. D., & Riofita, H. (2026). Peran Koperasi Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Journal of Management and Social Sciences, 4(2), 115–126.

Republik Indonesia. (1967). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Suarmanayasa, I. N., & Susila, G. P. A. J. (2025). Tantangan kelembagaan dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih. *Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) ke-10*.

Suratno, Denmar, D., & Narmaditya, B. S. (2021). The readiness of village unit cooperative in facing economic competition and globalization. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 9*(3), 96–102

Syafrizal, R., Aulia, C., & Hasyim, L. W. (2025).

Syafrizal, R., Aulia, C., & Hasyim, L. W. (2025). Analisis Peluang Dan Tantangan Koperasi Desa Merah Putih Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa. Accounting Progress, 4(2), 80–85.

Wardana, M. I. S., Ismail, I., Mursalin, I. A., & Rosyadi, A. A. (2025). Analisis peran dan strategi pengembangan koperasi di Bengkulu. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 4*(9), 1873–1890.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923